

# Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pada BKM Betul Kota Malang

**VIVI DWI ARYANTI\*; MASIYAH KHOLMI; ENDANG DWI W.**

Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246, Malang Jawa Timur 65144, Indonesia

\* Corresponding Author, E\_mail: vivirdlwan@yahoo.com

## ABSTRACT

The aims of this study is to describe the accountability and transparency of PNPM Mandiri fund management in self supporting public agency (BKM) BETUL Malang by using indicators of accountability and transparency that have been determined by Indonesian government. Object of the research is BKM BETUL. The data obtained from the questionnaires spread result and documentation relate the rule of BKM BETUL funding management in 2010-2011. The analysis showed that the accountability and transparency PNPM Mandiri fund management in BKM BETUL, from 13 indicators of accountability to ideal conditions, there were 10 indicators of accountability are fulfilled so the percentage obtained is 77%, which means that the condition is included in the fourth interval that is accountable. From 6 indicators transparency into ideal conditions, there are five indicators of transparency are fulfilled, so the percentage obtained is 83%, which means that the condition is included in the fourth interval that is transparent. Based on the analysis, it can be concluded that the PNPM Mandiri management of funds in the BKM BETUL been accountable and transparent.

Keywords: Accountability, BKM, PNPM Mandiri, Transparency.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BETUL Malang dengan menggunakan indikator akuntabilitas dan transparansi yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Obyek penelitian adalah BKM BETUL. Data diperoleh dari hasil pembagian kuesioner dan dokumentasi terkait kebijakan pengelolaan dana PNPM Mandiri dan laporan pengelolaan dana PNPM Mandiri tahun 2010-2011 BKM BETUL. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri di BKM BETUL, dari 13 indikator akuntabilitas untuk kondisi ideal, ada 10 indikator akuntabilitas terpenuhi sehingga persentase yang diperoleh adalah 77%, yang berarti bahwa kondisi ini termasuk dalam Interval keempat yang bertanggung jawab. Dari 6 indikator transparansi dalam kondisi ideal, ada lima indikator transparansi terpenuhi, sehingga persentase yang diperoleh adalah 83%, yang berarti bahwa kondisi ini termasuk dalam interval keempat yang transparan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa manajemen PNPM Mandiri dana di BKM BETUL telah akuntabel dan transparan.

Kata kunci: Akuntabilitas, BKM, PNPM Mandiri, Transparansi.

## PENDAHULUAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah suatu program yang diadakan oleh pemerintah sejak tahun 2007 yang bertujuan untuk mempercepat penganggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Melalui PNPM Mandiri, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan dapat dilaksanakan secara bersinergi

dan lebih terarah pada kelompok masyarakat miskin dan wilayah tertinggal ([www.pnppmandiri.org](http://www.pnppmandiri.org)). Tingkat penyimpangan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri selama 2011 mencapai 0,8% atau Rp 250 miliar, dari total penyaluran Rp 11,2 triliun ([inilahjabar.com](http://inilahjabar.com)). Tata kelola penyelenggaraan PNPM Mandiri yang baik merupakan suatu

kebutuhan yang tidak dapat terelakkan, salah satunya dalam penyelenggaraan pengelolaan dananya harus mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga bebas dari KKN.

Hal menarik yang perlu disadari adalah terfokus pada cara meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga sektor publik termasuk di dalamnya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam rangka pengentasan kemiskinan, serta diberikan wewenang untuk menyalurkan dana PNPM Mandiri ke setiap masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BKM ini dipilih oleh pemerintah karena keberadaan lembaga ini yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, lebih tepatnya berada di setiap kelurahan. Pelaporan pengelolaan dana PNPM Mandiri yang akuntabel dan transparan merupakan kewajiban bagi BKM, karena dana yang diterima merupakan dana dari pemerintah sehingga didalam pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan demi suksesnya program PNPM Mandiri serta terciptanya akuntabilitas publik.

Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku PNPM Mandiri tanpa terkecuali. Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan baik di tingkat program, daerah dan masyarakat. Selain wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta keuangan, PNPM Mandiri juga wajib melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip transparansi. Transparansi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dapat

diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai konsep PNPM Mandiri, kebijakan serta pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPM Mandiri baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat.

Adapun penelitian yang telah dilakukan untuk menilai akuntabilitas lembaga publik, yaitu Rahmansyah (2011) meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM Mandiri (Studi Pada UPK BKM Gadang Sejahtera Kota Malang), diperoleh hasil bahwa 13 indikator akuntabilitas yang digunakan, hanya 11 indikator akuntabilitas yang terpenuhi. Sehingga akuntabilitas pengelolaan dana PNPM Mandiri pada UPK BKM Gadang Sejahtera periode 2009-2010 sudah akuntabel. Keterbatasan penelitian tersebut adalah objek yang diteliti hanya UPK saja, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi untuk UP-UP yang lain dalam BKM.

Penelitian di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas lembaga publik sangat penting untuk diteliti. Namun, penelitian tersebut hanya menganalisis akuntabilitas saja, sementara akuntabilitas tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya transparansi. Akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen yang tidak dapat terpisahkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Penelitian ini layak dilakukan dikarenakan masih jarang penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana PNPM Mandiri. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pada BKM BETUL Kota Malang.

Berdasarkan paparan di atas, maka penting

untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana pengelolaan dana dan akuntabilitas pengelolaan dana PNPM Mandiri. Studi ini dilakukan di BKM BETUL Kota Malang dengan alasan kemudahan akses dan kebersediaan pengelola untuk dimintai data dan wawancara dalam rangka pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM BETUL Kota Malang, serta juga menggali bagaimana praktik transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri yang dikelola oleh BKM BETUL Kota Malang.

## **TINJAUAN LITERATUR DAN FOKUS PENELITIAN**

### **Akuntabilitas**

Widodo (2001) sebagaimana dikutip oleh Rahmanurrajjid (2008) menyatakan pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangan akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, efisien atau tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*cheks and balance*” dalam sistem administrasi. Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban suatu lembaga kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi atau tugas yang telah diembannya (www.p2kp.org).

### **Transparansi**

Werimon, dkk. (2007) menyebutkan

transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sehingga dengan adanya transparansi ini setiap orang dapat memperoleh informasi tentang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan terbuka. Transparansi mengandung arti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Artinya setiap aktivitas selalu bisa dibuktikan melalui data yang kuat, sah, dan akurat (Bakti, 2005 dalam Al-Makassary, 2007).

Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik, dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial dari warga (www.p2kp.org).

Fokus dari penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

- RM<sub>1</sub>: Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM BETUL Kota Malang.*  
*RM<sub>2</sub>: Sejauh mana transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri yang dikelola oleh BKM BETUL Kota Malang.*

## **METODE PENELITIAN**

### **OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN**

Objek penelitian yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BETUL yang berlokasi di Jalan Bantaran Barat II No. 2 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

### **JENIS DAN SUMBER DATA**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner mengenai

akuntabilitas dan transparansi yang disebarkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat atau yang biasa disebut KSM pada BKM BETUL. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari Badan Keswadayaan Masyarakat BETUL, yaitu kebijakan pengelolaan dana PNPM Mandiri dan laporan pengelolaan dana PNPM Mandiri tahun 2010-2011.

#### TEKNIK PEROLEHAN DATA

Teknik perolehan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan lainnya dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara sebagai berikut:

1. Dokumentasi. Mengumpulkan data yang bersumber dari arsip atau dokumen yang berada di BKM BETUL, yang berupa kebijakan pengelolaan dana PNPM Mandiri dan laporan pengelolaan dana PNPM Mandiri tahun 2010-2011 dan data yang terkait lainnya.
2. Kuesioner. Tujuan penyusunan kuesioner ini adalah untuk mendukung data sekunder yang diperoleh dari objek penelitian. Kuesioner ini diberikan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.

#### PENGUKURAN AKUNTABILITAS PNPM

Dalam booklet PNPM Mandiri Perkotaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum mengenai transparansi dan akuntabilitas BKM, menurut Kementerian Pekerjaan Umum indikator akuntabilitas diantaranya adalah:

1. UP-UP BKM dikelola bersama secara aktif sesuai dengan rencana atau program BKM, ada pengurusnya dan rutin melakukan pertemuan.
2. Pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai standar PNPM Mandiri.
3. Dana yang diterima BKM tersalur ke KSM utuh tanpa potongan.
4. Tidak ada penyalahgunaan dana atau korupsi

baik terhadap BOP BKM maupun penyaluran dana.

5. Penarikan dana dari rekening Bank BKM ditandatangani 3 orang anggota BKM.
6. Kegiatan yang dilaksanakan KSM sesuai dengan usulan yang disetujui oleh BKM.
7. Anggota KSM penerima dana BLM sama dengan yang diusulkan dalam proposal KSM, LPJ KSM lengkap dan benar termasuk di dalamnya rincian swadaya masyarakat yang dapat direalisasikan.
8. Minimal 90% dana pinjaman merupakan *outstanding loan*.
9. Tingkat pengembalian pinjaman bergulir minimal 90%.
10. Tidak ada pemotongan dana KSM kepada masyarakat.
11. 100% penerima manfaat kegiatan ekonomi bergulir dan sosial adalah KK miskin yang terdaftar dalam format PS 2 (daftar KK miskin hasil Pemetaan Swadaya).
12. 70% penerima manfaat kegiatan lingkungan umum adalah KK miskin yang terdaftar dalam PS2.
13. Pengelolaan keuangan sesuai dengan AD/ART.

#### PENGUKURAN TRANSPARANSI PNPM

Penilaian transparansi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi laporan pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM BETUL tahun 2010-2011 dengan menggunakan 6 (enam) indikator akuntabilitas yang ditentukan dalam pedoman PNPM Mandiri. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum indikator transparansi BKM diantaranya adalah:

1. Dana yang diterima BKM dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 (lima) papan informasi (pengumuman).
2. Laporan keuangan ditempel di 5 (lima) tempat

yang strategis dan disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setiap tanggal 5 (lima) di awal bulan.

3. KSM yang termasuk di dalam daftar tunggu dan telah mendapat prioritas dari BKM diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 (lima) papan informasi (pengumuman).
4. Rekening bank atas nama BKM dan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota BKM diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 (lima) papan informasi (pengumuman).
5. Setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan dilengkapi dengan papan informasi proyek dan minimal berisi tentang nama kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, nilai BLM, swadaya sumber dana lain, tanggal pelaksanaan dan nama KSM pelaksana.
6. Penetapan kebijakan keuangan didasarkan pada rembug bersama.

#### **TEKNIK ANALISIS DATA**

Teknik analisis data yang dilakukan adalah mengidentifikasi laporan pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM BETUL tahun 2010-2011 dengan didukung oleh hasil kuesioner yang disebar kepada responden. Analisis yang dilakukan terdiri dari lima tahap yaitu:

1. Mengidentifikasi kebijakan pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM BETUL tahun 2010-2011.
2. Mentabulasi kuesioner berdasarkan rekapitulasi jawaban responden.
3. Menguji validitas dan reliabilitas kuesioner
4. Menilai Akuntabilitas dan Transparansi
5. Mendeskripsikan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM BETUL mengacu pada Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sudah ditetapkan rembug warga kelurahan, yaitu sebagai berikut:

#### **SUMBER KEUANGAN BKM BETUL**

Sumber keuangan atau modal BKM BETUL diperoleh dari: (1) Sumber pendanaan yang berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari pemerintah yang digunakan untuk KSM usaha ekonomi produktif, pembangunan sarana prasarana dasar dan pengembangan sosial; (2) Jasa yang dikutip dari dana bergulir yang dikelola oleh KSM yang sebagian penggunaan jasa tersebut untuk penambahan modal BKM; dan (3) Dana dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **PENGUNAAN DANA PNPM MANDIRI**

Di dalam AD/ART BKM BETUL kota Malang menetapkan penggunaan dana PNPM Mandiri, yaitu: (1) Penambahan modal BKM BETUL sebesar 35%; (2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar lingkungan sebesar 25%; (3) Biaya operasional pengurus BKM BETUL sebesar 30%; dan (4) Kegiatan sosial masyarakat Kelurahan Tulusrejo sebesar 10%.

#### **LAPORAN KEUANGAN BKM**

BKM dibantu oleh kesekretariatan dan UPK diwajibkan membuat pembukuan yang rapi dan tertib mengenai kegiatan BKM, membuat laporan triwulan dan tahunan yang disesuaikan dengan variabel penilaian kinerja BKM. Dalam pengelolaan keuangan BKM BETUL menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan BKM BETUL diumumkan di papan pengumuman yang mudah dibaca dan diketahui oleh masyarakat. Laporan keuangan tahunan BKM harus diaudit oleh audit independen dan hasil audit disampaikan secara terbuka dalam rembug warga.

## UJI VALIDITAS

Setelah data kuesioner terkumpul, maka dilakukan tahapan tabulasi data yaitu merekapitulasi jawaban responden dan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Dari hasil pengujian validitas akuntabilitas diketahui bahwa 14 item mempunyai nilai korelasi lebih besar dari nilai standar validitas yaitu 0,312. 7 item instrument juga mempunyai nilai korelasi lebih besar dari nilai standar validitas yaitu 0,312. Dengan demikian item kuesioner dinyatakan valid dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pendekatan untuk melakukan pengujian reliabilitas menggunakan *Cronbach's alpha*. Koefisien reliabilitas *Cronbach's alpha* harus lebih besar dari 0,60 untuk dianggap bahwa semua item dalam instrument tersebut adalah reliabel. Dari hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa nilai reliabilitas semua item di dalam indikator akuntabilitas dan transparansi lebih besar dari 0,60 sehingga dikatakan reliabel.

## PEMBAHASAN

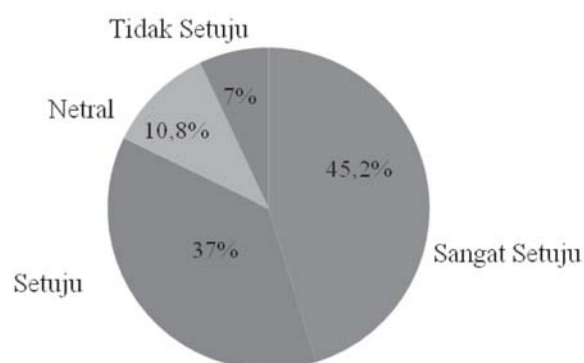
Setelah melakukan identifikasi kebijakan pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM BETUL dan mentabulasi jawaban kuesioner, maka langkah selanjutnya adalah menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM BETUL menggunakan 13 indikator akuntabilitas dan 6 indikator transparansi yang sudah disesuaikan.

Mendeskripsikan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri.

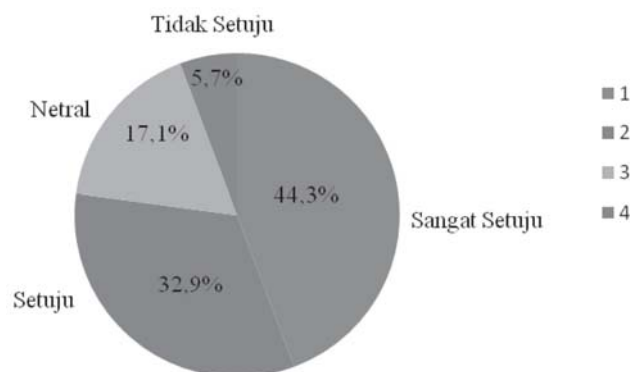
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil

kuesioner yang disebarakan kepada KSM, maka secara umum tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM BETUL dapat disajikan pada Gambar 1 dan 2.

Pada Gambar 1, KSM sebagian besar menjawab sangat setuju yaitu sebesar 45,2% dan setuju sebesar 37%. Hal ini menunjukkan bahwa KSM menilai BKM sudah akuntabel dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri. Dalam menilai transparansi, KSM juga sebagian besar menjawab sangat setuju yaitu sebesar 44,3% dan menjawab setuju sebesar 32,9%. Hal ini menunjukkan bahwa KSM menilai BKM sudah transparan dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri.



GAMBAR 1. JAWABAN RATA-RATA RESPONDEN TENTANG AKUNTABILITAS



GAMBAR 1. JAWABAN RATA-RATA RESPONDEN TENTANG TRANSPARANSI

Total jawaban setuju dan sangat setuju melebihi 75% dari masing-masing indikator akuntabilitas dan transparansi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM BETUL sudah akuntabel dan transparan.

Secara umum, jika ditabulasi, maka analisis data berdasarkan data yang diperoleh dari BKM maupun hasil kuesioner yang disebar kepada KSM dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Berdasarkan hasil penilaian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM BETUL tahun 2010-2011, dari 13 indikator akuntabilitas yang menjadi kondisi ideal, terdapat 10 indikator akuntabilitas yang terpenuhi, sehingga prosentase yang diperoleh yaitu 77%, yang artinya bahwa kondisi ini masuk dalam interval yang ke-4 yaitu akuntabel.

Pada 6 indikator trans-paransi yang menjadi kondisi ideal, terdapat 5 indikator transparansi yang terpenuhi, sehingga prosentase yang diperoleh yaitu 83%, yang artinya bahwa kondisi ini masuk dalam interval yang ke-4 yaitu transparan.

## SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari BKM dan hasil kuesioner yang dibagikan kepada KSM, dari 13 indikator akuntabilitas yang menjadi kondisi ideal, terdapat 10 (sepuluh) indikator akuntabilitas yang terpenuhi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM BETUL sudah akuntabel. Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari BKM dan hasil kuesioner yang dibagikan kepada KSM, dari 6 indikator transparansi yang menjadi kondisi ideal, terdapat 5 (lima) indikator transparansi yang terpenuhi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM BETUL sudah transparan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan

yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah; pertama, pemilihan responden dalam penyebaran kuesioner terbatas pada 40 orang dan hanya dilakukan pada KSM, belum dapat melihat perspektif pihak yang lain, seperti masyarakat yang tidak menerima manfaat dana bergulir. Selain itu, penelitian ini merupakan studi kasus pada satu objek BKM, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada BKM yang lain.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, Penelitian selanjutnya dianjurkan agar dapat menambah responden dalam penyebaran kuesioner, seperti masyarakat yang tidak menerima dana bergulir. Selain itu, penelitian selanjutnya dianjurkan pula dapat memperluas cakupan penelitian agar dapat ditemukan hasil penelitian yang lebih luas serta dapat dijadikan studi komparasi untuk mengetahui BKM Terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2008. *Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*. Diakses pada 24 Oktober 2011.
- Anonymous. 2007. *Review Partisipatif Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya. Jakarta. (diakses 10 Oktober 2011)
- Al-Makassary, R. 2007. *Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat: Beberapa observasi*. URL: <http://www.interseksi.org> (diakses pada 24 Oktober 2011)
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transpa-ransi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah
- Rahmansyah, A. 2011. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM Mandiri (Studi Pada UPK BKM Gadang Sejahtera Kota Malang)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rahmanurrasjid, A. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung-jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)*. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Sekaran, U. 2003. *Reseach Method for Business, 4ed*. USA: John Wiley & Sons.
- Soetrisno, Y. 2007. *Analisis Prestasi Manajemen PT. Pertamina (Persero) Jakarta Timur (Studi Pada PT. Pertamina Unit Diklat Khusus Perkapalan)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.

- Ulum, I. 2004. *Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar*. UMM Press. Malang.
- Ulum, I. 2011. Dasar-dasar Metode Penelitian. Power point dasar-dasar Metode Penelitian. <http://ihyaul.staff.umm.ac.id> (diakses 24 Oktober 2011)
- Werimon, S. I. Ghozali dan M. Nazir. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris di Provinsi Papua)*. Tesis, Universitas Diponegoro.
- Widyastuti, A. 2009. *Analisis Kandungan Akuntabilitas dan Transparansi Pada Perda Nomor 2 Tahun 2002 dan Nomor 10 Tahun 2004 Kota Malang Tentang Retribusi Pelayanan Publik*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- <http://www.google.co.id/search?q=modul+khusus+fasilitator+akuntabilitas+dan+transparansi&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a>. Diakses pada 24 Oktober 2011.
- <http://www.inilahjabar.com/read/detail/1786588/penyimpangan-pnpm-mandiri-capai-rp250-miliar>

## LAMPIRAN

### INSTRUMEN PENGUKURAN INSTRUMEN PENGUKURAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA PNPM MANDIRI

NO	INDIKATOR TRANSPARANSI	YA	TIDAK
1	Dana yang diterima BKM dan pengalokasiannya telah diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 papan informasi pengumuman.		
2	Laporan keuangan ditempel di 5 tempat strategis dan disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setiap tanggal 5 di awal bulan.		
3	KSM yang termasuk di dalam daftar tunggu dan telah mendapat prioritas dari BKM diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 papan informasi keuangan.		
4	Rekening bank atas nama BKM dan ditandatangani oleh 3 orang anggota BKM diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 papan informasi pengumuman.		
5	Setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan telah dilengkapi dengan papan informasi proyek yang berisi tentang nama kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, nilai BLM, swadaya sumber dana lain, tanggal pelaksanaan dan nama KSM pelaksana.		
6	Penetapan kebijakan keuangan didasarkan pada rembug warga.		